REKONSTRUKSI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KDRT

Oleh: Mahendra Kusuma, SH, M.Hum

(Dosen Tetap FH Universitas Tamansiswa Palembang)

ABSTRAK

Kasus KDRT yang menjadi salah satu penyebab dominan perkara perceraian di pengadilan agama sudah ditangani secara tidak langsung melalui mediasi perdata (yang biasa disingkat menjadi mediasi saja). Perceraian sebagai lingkup perkara perdata wajib didamaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sementara di Pengadilan Negeri sendiri belum ada dasar hukum yang mengatur mediasi sebagai metode penanganan perkara KDRT yang masuk dalam lingkup perkara pidana. Namun demikian ada beberapa putusan Pengadilan Negeri dalam kasus KDRT yang penyelesaiannya dilakukan secara mediasi dengan putusan perdamaian atau hukuman percobaan.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah universal yang dihadapi semua negara di dunia karena bisa terjadi dalam rumah tangga tanpa memandang perbedaan budaya atau bangsa, termasuk di Indonesia. Konflik kekerasan dalam rumah tangga ibarat api dalam sekam. Kekerasan merupakan api konflik yang terjadi dalam wilayah domestik yang membakar harmonisasi kehidupan pasangan suami-istri. Potensi kekerasan yang lebih banyak diderita oleh istri dan anak-anak ini akan terus menyala bila tidak segera dipadamkan. Hal ini disebabkan KDRT cenderung bersifat kontinyu dimana pelaku kekerasan sudah menjadi karakter dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam rumah tangga) sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyulut rokok dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada istri dan memakai atau menghabiskan uang istri; kekerasan

seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (istri)).³⁰

Penyelesaian perkara KDRT di Pengadilan Negeri berbeda putusan antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya. Ada hakim yang menjatuhkan putusan pidana berupa penjara kepada pelaku KDRT, namun ada juga hakim yang putusannya tidak berupa penghukuman tetapi lebih bersifat mendamaikan.

Dalam prakteknya esensi mediasi penal telah banyak dilaksanakan oleh banyak hakim, walupun tanpa didasari dan belum memakai teknik mediasi yang terstruktur. Banyak hakim pengadilan negeri mencoba mendamaikan korban dan pelaku berdasarkan diskresi mereka untuk menemukan solusi yang tepat yang diinginkan para pihak secara cepat, murah dan sederhana agar keutuhan keluarga tetap terjaga.³¹

Mediasi cocok untuk menangani perkara KDRT karena sesuai dengan sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan. Tujuan utama dari mediasi penal adalah melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan. Selain itu, mediasi penal juga bertujuan memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Hal ini sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan harmoni dalam penyelesaian sengketa, apalagi dalam konflik rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan:adalah: Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan KDRT?

B. PEMBAHASAN

Dalam menangani perkara KDRT, hukum acara yang digunakan masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun perkara ini memiliki karakteristik yang bersifat khusus, namun Undang-Undang

³⁰ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 39

³¹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 3

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur hukum acara yang bersifat khusus pula.

Selain itu, hakim juga dituntut untuk mengacu kepada sumber hukum tidak tertulis dalam memutus suatu perkara. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dalam dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ini artinya, hakim dituntut tidak hanya berpegang kepada aturan tertulis semata ketika hendak menjatuhkan suatu putusan, melainkan juga kepada aturan hukum tidak tertulis.

Putusan hakim yang baik seyogianya mengandung beberapa aspek. Pertama, ia merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial. Kedua, ia merupakan penjelmaan dari hukum yang berguna untuk setiap orang maupun masyarakat dan negara. Ketiga, ia merupakan gambaran yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Keempat, ia merupakan kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. Kelima, harus bermanfaat bagi setiap orang baik pelaku maupun korban yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keenam, ia tidak menimbulkan konflik baru antara pelaku dan korban serta keluarganya.

Disamping memperhatikan keenam aspek di atas, putusan hakim juga hendaknya bertitik tolak dari tiga unsur penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Menurut Gustav Radbruch suatu hukum yang ideal, hendaknya mencakup tiga elemen yaitu keadilan (*justice*), kegunaan atau kemanfaatan (*expediency*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Hukum tidak hanya melulu terpaku pada kepastian hukumnya saja, akan tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Dalam kaitannya dengan perkara KDRT, tiga unsur ini penting diperhatikan oleh hakim agar putusan yang dijatuhkan bisa mendatangkan manfaat tidak hanya bagi pelaku, tapi juga bagi korban dan masyarakat.

Efektivitas pidana perampasan kemerdekaan (penjara) telah banyak diragukan dewasa ini, apalagi dalam perkara KDRT sehingga perlu dicarikan alternatif

pidana yang lain seperti adanya perdamaian. Tujuannya adalah untuk menghindarkan pelaku dan keluarganya dari stigma jahat dan terhindar dari pengaruh negatif subkultur pidana penjara. Anak, istri dan sanak saudara terpidana pun tidak ikut menanggung beban malu. Dengan perdamaian itu, terpidana masih tetap dapat menghidupi keluarga karena tidak akan kehilangan pekerjaan.

Hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara KDRT, lebih-lebih jika pelaku mengakui perbuatannya dan korban memaafkan perbuatan pelaku. Dalam konteks ini, penjatuhan pidana penjara tidak akan memiliki manfaat apaapun. Melalui perdamaian, hak-hak korban yang selama ini tidak diakui dalam sistem peradilan pidana karena hanya berperan sebagai saksi, dapat dikembalikan. Korban juga memperoleh manfaat dari perdamaian tersebut.

Dari sekian ribu hakim di Indonesia hanya beberapa gelintir saja yang berani mengesampingkan nilai kepastian hukum demi untuk tercapainya keadilan substantif yang diyakininya. Bagi mereka yang berpendirian bahwa nilai keadilan lebih penting dari nilai kepastian hukum banyak dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa keadilan merupakan makna yang sesungguhnya dari fungsi mengadili.³²

Sering terdengar penegak hukum itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena para hakim pada umumnya hanya menginginkan terciptanya penegakan hukum/kepastian hukum dengan mengesampingkan atau mengabaikan rasa keadilan.

Model hakim seperti di atas, dapat merusak sendi-sendi dan nilai penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karenanya sekarang sangat dibutuhkan hakim yang visioner dan progresif untuk mengatasi kebuntuan penegakan hukum yang berkeadilan.

Di satu sisi hukum itu harus ditegakkan, tetapi di lain pihak keadilan pun harus ditegakkan. Penegakan hukum itu merupakan jembatan/pintu masuk untuk mencapai tujuan keadilan. Jika “keadilan” itu sudah tegak lewat koridor hukum dan diterima oleh masyarakat tanpa gejolak dimasyarakat, dapat dipastikan penegakan hukum yang berkeadilan telah terwujud, tetapi kalau hanya sebatas penegakan

³²Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013. hlm. 18

hukumnya tanpa menggali nilai-nilai keadilan lewat fakta yang terungkap dipersidangan, maka yang terjadi hanyalah penegakan hukum “semu”.³³

Putusan hakim yang menekankan kemanfaatan tidak berarti bahwa kepastian hukum dan keadilan telah diabaikan. Kepastian hukum dan keadilan tetap ada dalam putusan hakim ini, yakni kepastian hukum dengan telah memberikan jalan keluar terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh korban dan pelaku dan putusan dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan tersebut adalah adanya persamaan hak antara korban dengan pelaku, dalam arti pelaku memperoleh keringanan hukuman, sedangkan korban mendapatkan nafkah sesuai dengan yang diharapkannya.

Paradigma hakim yang sudah berani memakai pendekatan keadilan restoratif dalam menangani sebuah perkara adalah sebuah perkembangan yang menggembirakan dan patut disyukuri. Penulis berpendapat bahwa perkembangan ini merupakan satu langkah maju reformasi hukum yang harus didukung oleh segenap profesi hukum. Hakim sebagai mediator kasus ini memahami benar bahwa tujuan UU PKDRT bukan hanya melindungi kepentingan korban pada saat tertentu, tetapi juga demi masa depan, apalagi ketika ada kepentingan anak di dalamnya. Penyelesaian perkara KDRT menekankan pada pemulihan hubungan keluarga, bukan pada balas dendam.

C.SIMPULAN

Putusan hakim dalam berupa mediasi penal cocok untuk menyelesaikan perkara KDRT. Mediasi penal bisa diterapkan untuk kasus-kasus pidana tertentu karena penyelesaian perkara pidana secara damai telah dipraktekkan dalam masyarakat hukum adat. Dasar pertimbangan hakim dalam melakukan mediasi penal terhadap perkara penelantaran rumah tangga adalah hakim menganggap penjatuhan pidana tidak akan memberikan manfaat. Adalah lebih bijak kalau putusan KDRT diupayakan perdamaian antara pelaku dan korban, terlebih apabila kedua belah pihak dalam persidangan berjanji akan merawat tali perkawinan mereka.

³³ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 51

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2014
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.